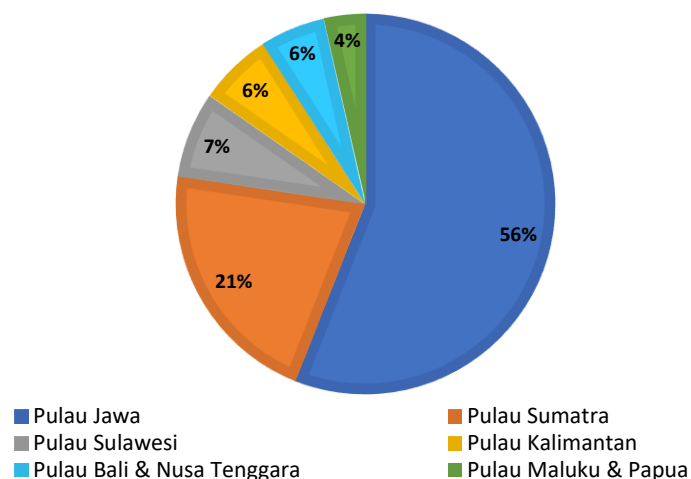


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk nomor empat terpadat di dunia setelah India, Amerika Serikat, dan Tiongkok dengan kurang lebih sebesar 287,8 juta jiwa. Di satu sisi jumlah penduduk yang tinggi menggambarkan negara yang berpotensi menjadi negara maju, tetapi di sisi lain kepadatan ini juga dapat menjadi permasalahan untuk negaranya jika tidak terdapat kebijakan yang sesuai. Masalah kepadatan penduduk juga dapat menyangkut kepentingan pembangunan dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Ada berbagai pandangan mengenai kepadatan penduduk, ada yang beranggapan bahwa kepadatan penduduk dapat menghambat pembangunan, sementara pendapat lain menyatakan bahwa kepadatan penduduk merupakan pendorong utama bagi kemajuan pembangunan di suatu negara (Bagianto et al., 2020).

Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pulau di Indonesia Tahun 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa Pulau Jawa pada tahun 2025 memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu sebesar 56% atau sebanyak 158 juta

jiwa. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Badan Pusat Statistik bahwa penyumbang penduduk terbesar di Indonesia terletak di Pulau Jawa. Jumlah penduduk di Pulau Jawa bertambah seiring berjalannya waktu hingga saat ini mencapai 56% atau 158 juta jiwa yang menjadikan Pulau Jawa sebagai pulau dengan penduduk terpadat dibandingkan pulau lainnya di Indonesia. Penduduk yang terus bertambah, juga dapat menjadikan tantangan bagi pemerintah daerahnya. Dalam hal ini pemerintah harus meningkatkan kebijakan perekonomiannya, dengan memperhatikan masalah kepadatan penduduk di wilayah tertentu supaya tidak terjadi ketimpangan antar daerah. Dengan melihat permasalahan ini pemerintah harus memperhatikan baik dari sektor perekonomian, pendidikan, maupun dari segi kesehatan guna meningkatkan pembangunan di Pulau Jawa yang merata.

Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang kuat dengan pembangunan ekonomi, infrastruktur yang baik dan memadai belum tentu menjadi indikator kesejahteraan di dalamnya, tetapi pembangunan ekonomi yang baik lebih mencerminkan kesejahteraan masyarakatnya (N. A. A. Putri et al., 2023). Pembangunan ekonomi di suatu negara merupakan sebuah proses yang melibatkan perubahan besar mulai dari struktur sosial hingga institusi nasional. Perubahan ini memiliki tujuan yang salah satunya adalah meningkatkan kualitas hidup manusia secara berkelanjutan (Susilo et al., 2023). Di Indonesia, pembangunan sebuah negara yang baik tidak hanya bertumpu pada indikator pertumbuhan ekonomi konvensional seperti Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup manusianya yang menyeluruh (Herdiansyah & Kurniati, 2020).

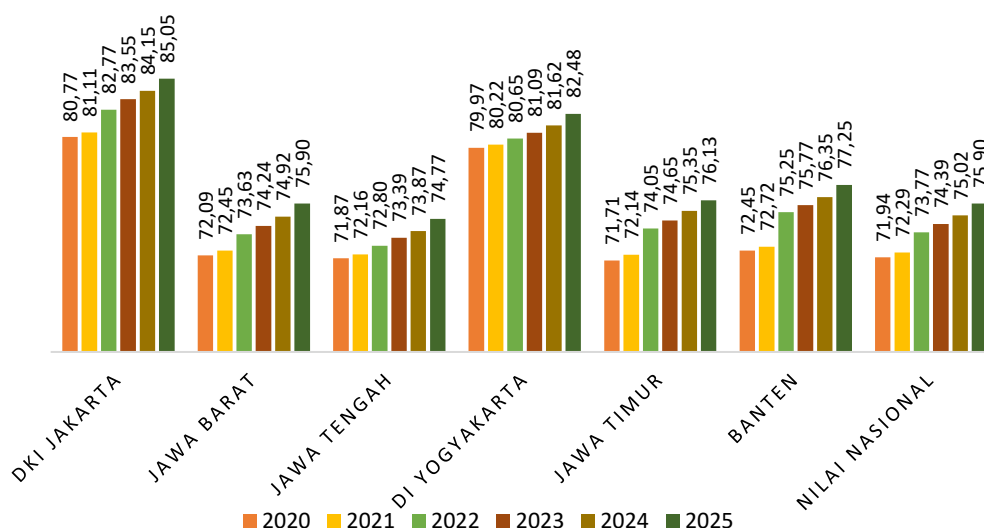
Pada tahun 1990, United Nations Development Programme (UNDP) memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk pertamakalinya. Indeks ini bertujuan untuk mengukur tingkat pembangunan suatu wilayah dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan kehidupan ekonomi masyarakat (Ginting, 2020). Konsep pembangunan pada saat ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga perpusat pada sumber daya manusia. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan yang sukses adalah pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan dan berkelanjutan. Dalam beberapa literatur ekonomi, pembangunan didefinisikan sebagai proses yang berkaitan untuk meningkatkan pendapatan riil perkaita Masyarakat (BPS, n.d.).

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara dalam menilai keberhasilan pembangunan di suatu negara, khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat (Susanti & Saumi, 2022). Pada perekonomian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah alat untuk mengukur capaian pembangunan manusia yang terdiri dari beberapa komponen dasar kualitas hidup melalui pendekatan 3 dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan layak. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disajikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Penyajian angka IPM di berbagai tingkat digunakan untuk mengetahui gambaran pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antar daerah guna meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kualitas modal manusia. Menurut pengamatan

dari Badan Pusat Statistik, terlihat bahwa Indonesia mengalami peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia dari tahun ke tahun.

Untuk menilai kualitas pembangunan manusia, salah satu indikator yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk provinsi yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mendekati 100 menunjukkan bahwa pembangunan di wilayah tersebut semakin baik. Begitupun sebaliknya, wilayah yang memiliki angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mendekati nol menunjukkan kondisi pembangunan yang buruk (Endang, Astuti & Udyana, 2024). Dalam menentukan tinggi rendahnya tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu daerah Badan Pusat Statistik memiliki kriteria sebagai berikut : Sangat Tinggi ($IPM > 80$), Tinggi ($70 < IPM < 80$), Sedang ($60 < IPM < 70$), dan Rendah ($IPM < 60$). Berdasarkan hal ini, berikut adalah nilai Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa selama periode 2020 sampai dengan 2025 :

Gambar 1. 2 Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa Tahun 2020-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Gambar 1.2 menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi di Pulau Jawa selama periode 2020–2025 yang cenderung

mengalami peningkatan setiap tahunnya. IPM Indonesia meningkat dari 71,94 pada tahun 2020 menjadi 75,02 pada tahun 2025 dan tetap berada dalam kategori tinggi. Pada tahun 2020–2021, provinsi yang memiliki IPM di atas rata-rata nasional adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Banten, sedangkan Jawa Tengah dan Jawa Timur masih berada di bawah IPM nasional. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan IPM tertinggi dan termasuk kategori sangat tinggi.

Pada periode 2022–2024, IPM seluruh provinsi di Pulau Jawa terus mengalami peningkatan. DKI Jakarta dan DI Yogyakarta secara konsisten berada pada kategori IPM sangat tinggi, sedangkan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten berada pada kategori tinggi. Pada periode ini, Jawa Timur mulai memiliki IPM di atas rata-rata nasional, sementara Jawa Barat dan Jawa Tengah masih berada di bawah IPM Indonesia pada beberapa tahun tertentu. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembangunan manusia di sebagian besar provinsi di Pulau Jawa.

Pada tahun 2025, kondisi IPM di Pulau Jawa menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hampir seluruh provinsi memiliki IPM di atas atau setara dengan IPM nasional, kecuali Jawa Tengah yang masih berada sedikit di bawah rata-rata nasional. DKI Jakarta tetap menjadi provinsi dengan IPM tertinggi, diikuti DI Yogyakarta, Banten, dan Jawa Timur. Secara keseluruhan, peningkatan IPM di Pulau Jawa menunjukkan adanya kemajuan dalam kualitas hidup masyarakat, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun standar hidup layak.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa IPM Indonesia maupun IPM pada provinsi di Pulau Jawa selama periode tahun 2020 sampai dengan 2025 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pulau Jawa dikenal sebagai wilayah

metropolitannya khususnya Jabodetabek di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Kehadiran wilayah metropolitan inilah yang menjadikan Pulau Jawa memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Di Pulau Jawa juga terdapat DKI Jakarta yang menjadi Ibu Kota negara Indonesia, yang pastinya menjadi pusat perekonomian Indonesia, hal ini menjadikan Pulau Jawa menjadi wilayah dengan tingkat ekonomi dan sosial yang tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa, yang terdiri dari enam provinsi mengalami kenaikan dalam 6 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Pulau Jawa terus meningkat seiring waktu dan pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid 19.

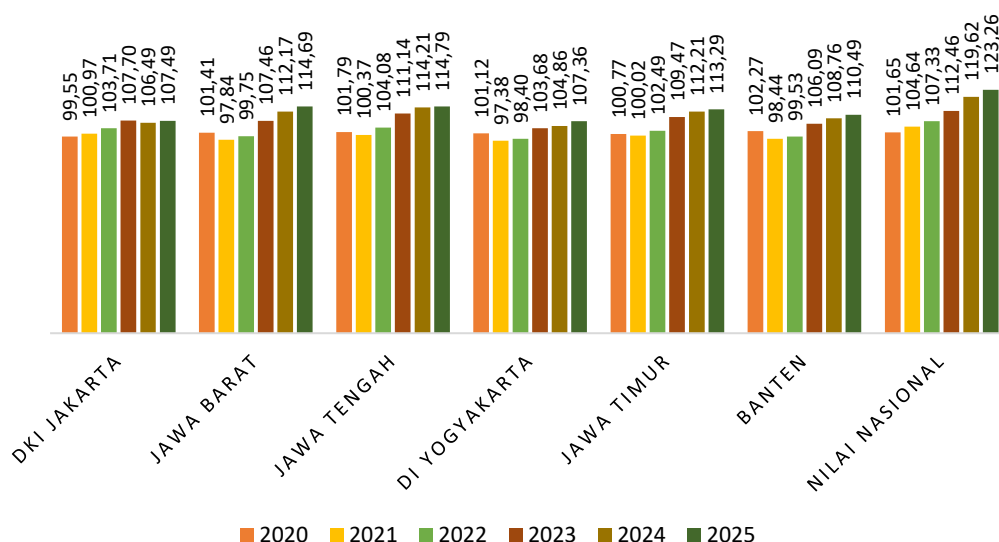
Kesejahteraan masyarakat di Pulau Jawa biasanya terbagi menjadi dua yaitu masyarakat perdesaan yang didominasi oleh sektor agraris dan masyarakat perkotaan yang bertumpu pada sektor industri dan jasa (Kristriantono & Yulawati, 2022). Di wilayah perdesaan, Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi instrumen yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat diperdesaan yang di dominasi oleh petani. NTP merupakan rasio indeks harga yang diterima oleh petani (It) dengan indeks harga yang dibayar oleh petani (Ib). It adalah indikator tingkat pendapatan ppetani selaku produsen, sedangkan Ib merupakan keutuhan petani untuk konsumsi dan biaya produksi (Syifa Aulia et al., 2021).

Pergerakan naik turunnya NTP menunjukkan naik turunnya tingkat kesejahteraan petani (Dewi Yuliani et al., 2024). Nilai Tukar Petani (NTP) mencerminkan *terms of trade* atau daya tukar antara barang hasil produksi pertanian dengan barang dan jasa yang digunakan untuk produksi (Wahyudi & Andang, 2025). Badan Pusat Statistik (BPS) mengemukakan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) menurut subsektor terdiri dari NTP Tanaman Pangan (NTPP), NTP

Tanaman Hortikultura (NTPH), NTP Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR), NTP Peternakan (NTPT), dan NTP Perikanan (NTNP).

Menurut Badan Pusat Statistik, Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk hasil pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun yang digunakan untuk proses produksi. Secara umum, NTP dibagi menjadi tiga bagian, yaitu $NTP > 100$ artinya petani mengalami surplus karena hasil produksinya lebih besar daripada pengeluarannya; $NTP = 100$ artinya tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami kenaikan maupun penurunan karena biaya produksinya sama dengan harga barang yang dikonsumsi; $NTP < 100$ artinya petani mengalami defisit karena biaya produksinya lebih besar dibandingkan hasilnya (Annisa & Chandriyanti, 2021). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), berikut adalah data perkembangan NTP di Pulau Jawa tahun 2020 sampai dengan 2025 :

Gambar 1. 3 Nilai Tukar Petani di Pulau Jawa Tahun 2020-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Gambar 1.3 menunjukkan perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa selama periode 2020–2025 yang secara umum mengalami peningkatan setiap tahunnya. NTP Indonesia meningkat dari 101,65 pada tahun 2020 menjadi 123,26 pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara nasional petani berada pada kondisi *surplus* karena harga hasil produksi pertanian lebih tinggi dibandingkan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan biaya produksi. Pada tahun 2020, provinsi yang memiliki NTP di atas rata-rata nasional hanya Jawa Tengah dan Banten, sedangkan DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur berada di bawah rata-rata nasional. Meskipun demikian, hampir seluruh provinsi di Pulau Jawa telah mengalami surplus dengan nilai NTP di atas 100, kecuali DKI Jakarta yang masih mengalami defisit.

Pada tahun 2021 dan 2022, seluruh provinsi di Pulau Jawa memiliki NTP di bawah rata-rata nasional. Tahun 2021 menunjukkan penurunan NTP di beberapa provinsi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode ini, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Banten mengalami defisit karena nilai NTP berada di bawah 100, sedangkan DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masih berada pada kondisi surplus. Memasuki tahun 2022, kondisi NTP mulai mengalami perbaikan yang ditandai dengan meningkatnya nilai NTP di hampir seluruh provinsi di Pulau Jawa. Walaupun beberapa provinsi masih mengalami defisit, peningkatan tersebut menunjukkan mulai membaiknya kesejahteraan petani dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada periode 2023–2025, kondisi NTP di Pulau Jawa semakin membaik. Seluruh provinsi di Pulau Jawa berhasil mencapai nilai NTP di atas 100 sehingga seluruh petani berada pada kondisi surplus. Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi provinsi dengan NTP tertinggi di Pulau Jawa, sedangkan DI Yogyakarta memiliki

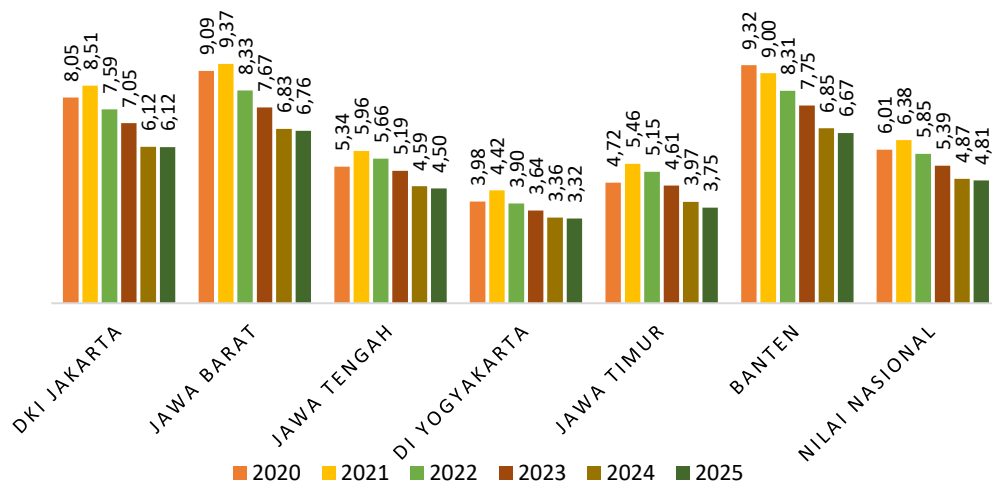
NTP terendah meskipun tetap berada dalam kondisi surplus. Selain itu, seluruh provinsi masih memiliki NTP di bawah rata-rata nasional, namun nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, peningkatan NTP selama periode penelitian menunjukkan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan petani dan kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan konsumsi maupun biaya produksinya.

Berdasarkan uraian di atas NTP di Pulau Jawa cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2021. Sedangkan NTP nasional terus mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Pulau Jawa memiliki kekuatan di sektor pertanian yang terletak pada tanaman pangan dan hortikultura. Sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dengan menjamin ketersediaan pupuk berubsidi untuk mendorong optimalisasi pertanian.

Meskipun di Pulau Jawa memiliki besaran Nilai Tukar Petani (NTP) yang masih di bawah Pulau Sumatera yang menduduki peringkat tertinggi nasional dan Pulau Kalimantan, harga produk pertanian di Pulau Jawa cenderung stabil. Harga komoditas pertanian di Pulau Jawa cenderung stabil karena lebih berfokus pada konsumsi domestik saja. Sedangkan harga komoditas pertanian di luar Pulau Jawa sering kali dipengaruhi oleh harga komoditas ekspor yang fluktuatif. Luas lahan pertanian juga mempengaruhi banyaknya hasil pertanian. Pada enam tahun terakhir sempat mengalami penurunan setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2025 lahan pertanian kembali luas sebesar 11,32 juta hektare. Hal ini terjadi karena pemerintah melakukan kebijakan yang salah satunya adalah optimalisasi lahan rawa atau mengubah lahan rawa menjadi lahan sawah produktif terutama di wilayah Provinsi Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah (Kementrian Pertanian RI, 2025).

Di wilayah perkotaan, dinamika pembangunan manusia sangat tercermin dari salah satunya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka artinya seseorang yang telah tergolong sebagai angkatan kerja, yang masih aktif mencari kerja dengan tingkat upah tertentu, tetapi belum mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya (Ashari & Athoillah, 2023). Tingkat Pengangguran Terbuka dapat menghambat pembangunan ekonomi di suatu negara, karena masyarakat tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan sama sekali (Qamariyah et al., 2022). Tingginya TPT juga akan berdampak pada peningkatan kasus kriminalitas di lingkungan masyarakat yang secara tidak langsung menurunkan tingkat kualitas sumber daya manusia, sehingga kontribusi terhadap angka IPM tidak optimal. Tingkat pengangguran terbuka di daerah perkotaan Indonesia cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan Indonesia. Secara umum, TPT dapat dikategorikan menjadi TPT < 4% artinya TPT rendah; TPT 4% - 7% artinya TPT sedang; dan TPT > 7% artinya TPT tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), berikut adalah data perkembangan TPT di Pulau Jawa tahun 2020 sampai dengan 2025 :

Gambar 1. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa Tahun 2020-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Gambar 1.4 menunjukkan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa selama periode 2020–2025 yang secara umum mengalami penurunan. Pada tahun 2020, TPT Indonesia sebesar 6,01 dan meningkat menjadi 6,38 pada tahun 2021 akibat kondisi ekonomi yang belum stabil. Pada periode tersebut, provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten memiliki TPT di atas rata-rata nasional dengan kategori tinggi. Sementara itu, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur memiliki TPT di bawah rata-rata nasional, dengan DI Yogyakarta termasuk kategori rendah.

Pada tahun 2022 dan 2023, TPT Indonesia mulai mengalami penurunan menjadi 5,85 dan 5,39. Penurunan ini juga terjadi pada sebagian besar provinsi di Pulau Jawa. DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten masih menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Pulau Jawa meskipun angkanya terus menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur tetap memiliki TPT di bawah rata-rata nasional. DI Yogyakarta secara konsisten menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran terendah di Pulau Jawa.

Pada periode 2024–2025, TPT Indonesia kembali menurun menjadi 4,87 dan 4,81 yang menunjukkan kondisi ketenagakerjaan semakin membaik. Pada tahun 2025, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten masih memiliki TPT di atas rata-rata nasional, namun telah berada pada kategori sedang. Sementara itu, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur tetap berada di bawah rata-rata nasional dengan tingkat pengangguran yang relatif lebih rendah. Secara keseluruhan, penurunan TPT selama periode penelitian menunjukkan adanya perbaikan kondisi pasar tenaga kerja dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa TPT Indonesia maupun TPT pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa pada periode 2020 sampai

dengan 2025 sempat mengalami peningkatan pada tahun 2021 kemudian tahun selanjutnya terus mengalami penurunan sampai akhir periode 2025. Angka penurunan tersebut terus turun dari tahun ke tahun, penurunan ini terjadi karena terjadi pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid 19. Sektor-sektor yang terdampak pandemi sudah mulai beroperasi kembali, sehingga tenaga kerja yang awalnya dikurangi sudah mulai dibutuhkan kembali. Pembatasan aktivitas sudah di hilangkan sehingga perekonomian dapat berjalan normal seperti semula. Penurunan yang terus menerus setiap tahunnya mencerminkan perekonomian di Indonesia terus mengalami peningkatan terutama sumber daya manusianya. DI Yogyakarta memiliki TPT yang rendah kecuali tahun 2021 karena DI Yogyakarta merupakan destinasi wisata utama dan memiliki ekosistem ekonomi yang stabil dimana sektor jasa, kuliner, dan ekonomi kreatif mampu menyerap tenaga kerja di sektor formal maupun informal dengan cepat.

Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa sudah mulai stabil setelah mengalami ketidak seimbangan antara angkatan kerja yang tinggi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas akibat pandemic Covid 19 yang melanda Indonesia. Pengangguran terbuka masih terjadi di Pulau Jawa karena angkatan kerja yang tercipta lebih tinggi dibandingkan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Jumlah angkatan kerja di Indonesia selama periode 2020 sampai dengan 2025 terus mengalami peningkatan terutama di tahun 2023 sampai dengan 2024 karena sektor-sektor yang awalnya mengurangi tenaga kerja kini mulai melakukan penyerapan banyak tenaga kerja baru. Dan hingga saat ini jumlah angkatan kerja yang terserap di dunia kerja mulai stabil. Serta masih banyaknya angkatan kerja yang memilih bekerja di sektor informal yaitu sebesar 57% dari jumlah angkatan kerja.

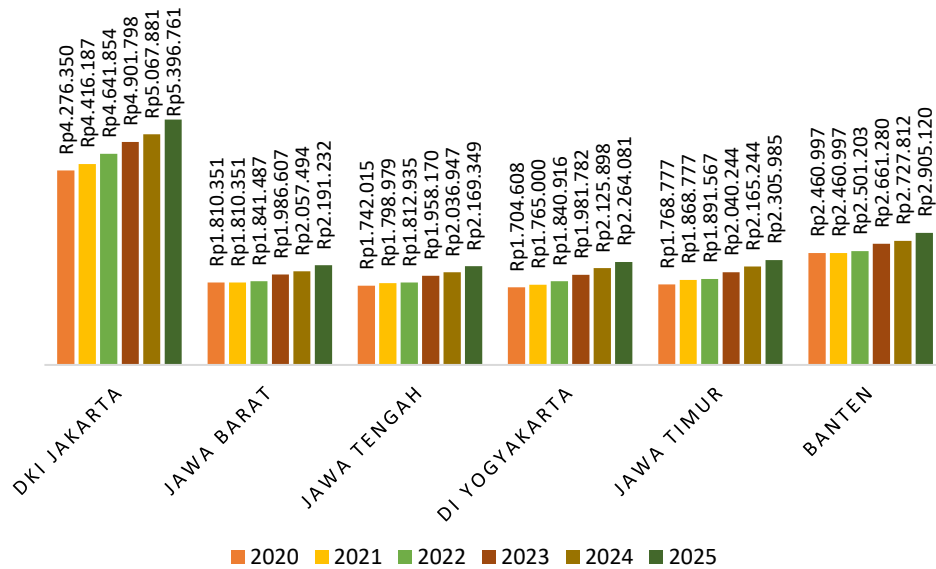
Selain NTP dan TPT, Upah Minimum Provinsi juga merupakan cerminan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Upah Minimum Provinsi merupakan standar upah minimum bagi pekerja di lingkungan kerjanya yang kemudian digunakan pemberi kerja untuk membayar upah sesuai dengan standar minimum yang ditentukan (Sahara & Iryani, 2023). Upah Minimum Provinsi (UMP) berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di suatu provinsi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Luthfiyah Ghinastri & Syafitri, 2024) upah minimum juga dapat membuat sejumlah perusahaan melakukan PHK atau pemutusan kerja massal dan mengganti tenaga kerja tersebut menggunakan mesin. Sehingga dengan tidak langsung upah minimum juga dapat meningkatkan pengangguran di suatu wilayah. Beberapa perusahaan juga akan melakukan relokasi ke daerah yang memiliki upah minimum yang lebih rendah guna memangkas biaya produksi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Luthfiyah Ghinastri & Syafitri, 2024) Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kemiskinan. Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan instrumen kebijakan untuk menjamin standar hidup layak bagi pekerja di lapisan bawah khususnya. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) secara langsung akan meningkatkan pendapatan rumah tangga, yang pada akhirnya akan memperkuat daya beli masyarakat. Jumlah kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dapat menekan angka kemiskinan sangat bergantung pada keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. perkembangan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa selama periode 2020–2025 yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan uraian di atas dan data dari kementerian ketenagakerjaan, berikut

adalah data perkembangan TPT di Pulau Jawa tahun 2020 sampai dengan 2025

:

Gambar 1. 5 Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020-2025



Sumber : Kementerian Ketenagakerjaan, 2026

Gambar 1.5 menunjukkan perkembangan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa selama periode 2020–2025. Pada tahun 2020, terdapat perbedaan UMP yang cukup besar antar provinsi. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan UMP tertinggi sebesar Rp4.276.350, jauh di atas provinsi lainnya, sedangkan DI Yogyakarta memiliki UMP terendah sebesar Rp1.704.608. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat juga memiliki UMP yang relatif lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta, sementara Banten berada pada posisi kedua tertinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan tingkat upah antar wilayah di Pulau Jawa.

Pada tahun 2021, kenaikan UMP di sebagian besar provinsi cenderung terbatas akibat dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi kondisi perekonomian. DKI Jakarta tetap memiliki UMP tertinggi, sedangkan beberapa

provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta hanya mengalami kenaikan kecil. Memasuki tahun 2022 dan 2023, kenaikan UMP mulai lebih signifikan seiring membaiknya kondisi ekonomi. Seluruh provinsi mengalami peningkatan UMP secara bertahap, dengan DKI Jakarta tetap berada pada posisi tertinggi dan Jawa Tengah masih menjadi provinsi dengan UMP terendah di Pulau Jawa.

Pada periode 2024–2025, tren kenaikan UMP terus berlanjut secara lebih stabil di seluruh provinsi. DKI Jakarta mencapai UMP tertinggi selama periode penelitian, yaitu sekitar Rp5,39 juta pada tahun 2025, sedangkan Banten berada pada posisi kedua tertinggi. Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Jawa Barat juga menunjukkan peningkatan UMP yang konsisten setiap tahun. Meskipun seluruh provinsi mengalami kenaikan upah minimum, kesenjangan UMP antar provinsi masih terlihat cukup besar. Secara keseluruhan, perkembangan UMP di Pulau Jawa menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan pekerja serta pemulihan kondisi ekonomi selama periode penelitian.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, peneliti berusaha untuk menganalisis komponen mana yang lebih berpengaruh dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu Nilai Tukar Petani (NTP), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Upah Minimum Provinsi (UMP). Penelitian ini berfokus pada aspek yang menjadi penentu perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada analisis secara simultan variabel Nilai Tukar Petani (NTP), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini menggunakan rentang waktu 2020 sampai dengan 2025 dimana rentang waktu tersebut meliputi fase pemulihan

ekonomi pasca pandemi. Penelitian ini juga menggunakan data panel yang dilakukan di Pulau Jawa karena Pulau Jawa merupakan pusat perekonomian Indonesia dan memiliki kepadadatan penduduk tertinggi di Indonesia.

Ruang lingkup penelitian ini cukup luas dengan menggunakan variabel variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel dependen. Serta menggunakan variabel independen meliputi Nilai Tukar Petani (NTP) untuk merepresentasikan kesejahteraan sektor agraris, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai indikator serapan tenaga kerja, dan Upah Minimum Provinsi sebagai representasi standar pendapatan formal. Maka dengan hal tersebut peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Nilai Tukar Petani ,Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Upah Minimum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa Tahun 2020-2025”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis pengaruh Nilai Tukar Petani (NTP) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa pada tahun 2020 sampai dengan 2025.
2. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa pada tahun 2020 sampai dengan 2025.
3. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa pada tahun 2020 sampai dengan 2025.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel Nilai Tukar Petani (NTP), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Upah Minimum Provinsi

(UMP) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa pada tahun 2020 sampai dengan 2025.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Nilai Tukar Petani (NTP) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa pada tahun 2020 sampai dengan 2025 ?
2. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa pada tahun 2020 sampai dengan 2025 ?
3. Apakah Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa pada tahun 2020 sampai dengan 2025 ?
4. Apakah secara simultan variabel Nilai Tukar Petani (NTP), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa pada tahun 2020 sampai dengan 2025 ?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur ekonomi pembangunan, khususnya penelitian tentang kesejahteraan masyarakat di wilayah yang mempunyai karakteristik seperti Pulau Jawa. Selain itu,

penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah di Pulau Jawa untuk merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun strategi pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pengendalian tingkat pengangguran terbuka, penetapan upah minimum yang tepat, serta peningkatan nilai tukar petani.

1.5 Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini berfokus pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti Nilai Tukar Petani (NTP), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Upah Minimum Provinsi (UMP). Batasan penelitian ini adalah hanya pada enam provinsi di Pulau Jawa yang terdiri dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten. Sehingga hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk wilayah lain selain wilayah yang dituju. Penelitian ini menggunakan data panel tahunan dengan rentang waktu 2020 sampai dengan 2025 yang sumbernya dari BPS dan Kemenaker. Sehingga penemuan penelitian ini hanya berlaku pada rentang waktu tersebut.